



DINAS KUKM  
KOTA BANDUNG

GEMAH RIPA WISAWA MUKTI

# RENJA

# 2023

## RENCANA KERJA



# KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya, penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung tahun 2023 telah disusun sesuai amanat dalam Permendagri 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai sarana evaluasi kegiatan yang dapat dijadikan cerminan/gambaran dalam pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang dan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kota Bandung.

Pemahaman yang cermat terhadap program-program prioritas dan isu-isu strategis Pemerintah Kota Bandung maupun langkah-langkah yang diperlukan, akan menghasilkan rencana kerja yang berkualitas sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung dan mengacu kepada RKPD Kota Bandung yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Semoga rencana kerja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kota Bandung.

Bandung, 2023  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KOTA BANDUNG



Drs. ATET DEDI HANDIMAN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640225 199303 1 004

# HALAMAN

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II EVALUASI KINERJA DINAS KOPERASI UKM TAHUN 2021 .....</b>	<b>12</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota .....	45
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM Kota Bandung.....	54
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	56
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI UKM.....</b>	<b>68</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan RPJMD .....	68
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah .....	69
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI UKM .....</b>	<b>73</b>
4.1 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dinas Koperasi UKM Tahun 2023 .....	73
4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi UKM Tahun 2023.....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Rencana kerja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Rencana kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, proses penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah terdiri dari tahapan:

1. Persiapan penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Rencana kerja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Rencana kerja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan penyusunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan rancangan awal Rencana kerja Perangkat Daerah

Penyusunan rancangan awal Rencana kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi, hasil Rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Rencana kerja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan awal Rencana kerja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu. Sistematisa penyusunan rancangan awal Rencana kerja Perangkat Daerah memuat paling sedikit pendahuluan, hasil evaluasi Rencana kerja Perangkat Daerah

tahun lalu, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah serta penutup.

3. Penyusunan Rancangan Rencana kerja Perangkat Daerah

Penyusunan Rancangan Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Rencana kerja Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bappelitbang Kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Setelah proses verifikasi rancangan awal Rencana kerja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kembali ke Bappelitbang Kota untuk tahapan selanjutnya.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappelitbang Kota yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana kerja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Rencana kerja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan.

5. Perumusan rancangan akhir Rencana kerja Perangkat Daerah

Perumusan Rancangan akhir Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Rencana kerja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Rencana kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD, hal ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah.

## 6. Penetapan Rencana kerja Perangkat Daerah

Tahapan akhir adalah penetapan Rencana kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappelitbang Kota untuk diverifikasi agar selaras dengan peraturan Kepala daerah tentang RKPD dan Rencana kerja Perangkat Daerah lainnya, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan dijadikan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2023 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2023.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Rencana kerja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berjalan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Presiden RI nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
18. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

19. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bandung;
21. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
22. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 32 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
23. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.
24. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2023 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung pada tahun 2023.

Tujuan penyusunan Rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2023;
2. Memudahkan aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
3. Memudahkan aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2023;
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Bandung Tahun 2023.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

###### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana kerja Perangkat Daerah dengan dokumen Perangkat Daerah, Rencana strategis Perangkat Daerah, dengan Rencana kerja Kantor/Lembaga dan Rencana kerja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

###### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN LALU**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja tahun Lalu dan capaian Renstra Dinas Koperasi dan UKM

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Sub-bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDG (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

### 2.5 Penelaahan usulan Program dan kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

#### 4.1 Program dan Kegiatan serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023 berisikan penjelasan mengenai:

- a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; dan
- b. Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan UKM.

### **BAB V PENUTUP**

# **BAB II**

## **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOPERASI UKM TAHUN 2021**

Proses penyusunan suatu dokumen perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal, yaitu sejauh mana efektivitas pelaksanaan proses perencanaan, pembangunan, dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun mendatang.

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas koperasi dan UKM sampai dengan tahun berjalan yaitu tahun 2022 terhadap target di tahun 2023. Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Koperasi dan UKM tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja tahun 2021 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi dan Ukm telah dapat diketahui.

Dinas Koperasi UKM Kota Bandung pada tahun 2021 telah melaksanakan 1 program non urusan yang terdiri dari 6 kegiatan dan 17 sub kegiatan dan 6 program urusan wajib Koperasi UKM yang terdiri dari 7 kegiatan serta 11 sub kegiatan. Berikut rekapitulasi anggaran dan realisasi program / kegiatan tahun 2021.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
		Rp	%
<b>2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13.117.844.300</b>	<b>11.195.945.342</b>	<b>85,35</b>
<b>2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.825.570.814</b>	<b>8.538.544.085</b>	<b>86,90</b>
2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.825.570.814	8.538.544.085	<b>86,90</b>
<b>2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>53.075.000</b>	<b>46.750.000</b>	<b>88,08</b>
2.17.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53.075.000	46.750.000	<b>88,08</b>
2.17.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	<b>0,00</b>
<b>2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.079.886.440</b>	<b>793.509.630</b>	<b>73,48</b>
2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.592.000	9.112.400	<b>95,00</b>
2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	747.766.890	538.799.730	<b>72,05</b>
2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	101.341.350	87.570.450	<b>86,41</b>
2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.185.200	32.226.800	<b>82,24</b>
2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	131.393.000	91.658.250	<b>69,76</b>
2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.708.000	13.172.000	<b>53,31</b>
2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.900.000	20.970.000	<b>80,97</b>

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
		Rp	%
<b>2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>209.488.620</b>	<b>202.380.000</b>	<b>96,61</b>
2.17.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	209.488.620	202.380.000	<b>96,61</b>
<b>2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.186.021.800</b>	<b>1.034.735.515</b>	<b>87,24</b>
2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	368.542.800	260.901.863	<b>70,79</b>
2.17.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	499.044.000	460.096.152	<b>92,20</b>
2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.435.000	313.737.500	<b>98,52</b>
<b>2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>763.801.626</b>	<b>580.026.112</b>	<b>75,94</b>
2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	435.545.380	329.748.388	<b>75,71</b>
2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.991.000	21.300.000	<b>60,87</b>
2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	293.265.246	228.977.724	<b>78,08</b>
<b>2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>1.306.420.600</b>	<b>1.254.007.100</b>	<b>95,99</b>

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
		Rp	%
<b>2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1.306.420.600</b>	<b>1.254.007.100</b>	<b>95,99</b>
2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.012.428.600	965.218.100	<b>95,34</b>
2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	293.992.000	288.789.000	<b>98,23</b>
<b>2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>386.709.400</b>	<b>383.022.900</b>	<b>99,05</b>
<b>2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>386.709.400</b>	<b>383.022.900</b>	<b>99,05</b>
2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	386.709.400	383.022.900	<b>99,05</b>
<b>2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>2.182.584.360</b>	<b>1.955.421.250</b>	<b>89,59</b>
<b>2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.023.149.160</b>	<b>930.631.250</b>	<b>90,96</b>

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
		Rp	%
2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.023.149.160	930.631.250	<b>90,96</b>
<b>2.17.05.2.03 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.159.435.200</b>	<b>1.024.790.000</b>	<b>88,39</b>
2.17.05.2.03.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	1.159.435.200	1.024.790.000	<b>88,39</b>
<b>2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>1.591.789.890</b>	<b>1.458.883.500</b>	<b>91,65</b>
<b>2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.591.789.890</b>	<b>1.458.883.500</b>	<b>91,65</b>
2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.591.789.890	1.458.883.500	<b>91,65</b>
<b>2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>2.865.437.546</b>	<b>2.322.594.400</b>	<b>81,06</b>
<b>2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>2.865.437.546</b>	<b>2.322.594.400</b>	<b>81,06</b>

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
		Rp	%
2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.332.483.000	1.035.834.800	<b>77,74</b>
2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	533.147.046	488.987.350	<b>91,72</b>
2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	655.594.500	626.964.250	<b>95,63</b>
2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	344.213.000	170.808.000	<b>49,62</b>
<b>2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>3.883.366.925</b>	<b>3.364.749.503</b>	<b>86,65</b>
<b>2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>3.883.366.925</b>	<b>3.364.749.503</b>	<b>86,65</b>
2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3.883.366.925	3.364.749.503	<b>86,65</b>
Jumlah Total	<b>25.334.153.021</b>	<b>21.934.623.995</b>	<b>86,58</b>

Hasil Analisis pencapaian kinerja belanja langsung Dinas Koperasi dan UKM tahun 2021 terdiri dari 1 program non urusan yang terdiri dari 6 kegiatan dan 17 sub kegiatan dan 6 program urusan wajib Koperasi dan UKM yang terdiri dari 7 kegiatan serta 11 sub kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Total anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung sebesar Rp 25.334.153.021,-
2. Total realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung sebesar Rp 21.934.623.995,-
3. Penyerapan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebesar 86,58%.

Hasil pencapaian kinerja pada Dinas Koperasi dan UKM pada tahun anggaran 2021 belum tercapai secara optimal karena masih terdampak Pandemi Covid-19 dan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyerapan anggaran program/kegiatan sehingga diharapkan di tahun yang akan datang kendala yang ada dapat diminimalisasi dan anggaran diharapkan dapat terserap secara optimal.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana strategis Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021 dan sampai dengan triwulan II tahun 2022 Rencana strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.2 (TC.29) di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2021**  
**Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung**

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) dan Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah									
2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
2.11.2.11.01.01.02	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa bulanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	24 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%		24 laporan	100%
2.11.2.11.01.01.06	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	36 Unit	18 unit	18 Unit	18 Unit	100%		36 Unit	100%

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.2.11.01.01.08	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa kebersihan kantor	24 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%		24 laporan	100%
2.11.2.11.01.01.09	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit Peralatan kerja diperbaiki	98 unit	49 unit	49 unit	49 unit	100%		98 unit	100%
2.11.2.11.01.01.10	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan ATK	24 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%		24 laporan	100%
2.11.2.11.01.01.11	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis pengadaan cetakan dan penggandaan	13 jenis	9 jenis	4 jenis	4 jenis	100%		13 jenis	100%
2.11.2.11.01.01.12	Kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor	12 laporan	12 laporan	-	-	-		12 laporan	100%
2.11.2.11.01.01.13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	24 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%		24 laporan	100%
2.11.2.11.01.01.14	Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%		24 laporan	100%

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.2.11.01.01.15	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%		24 laporan	100%
2.11.2.11.01.01.17	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah laporan kegiatan penyediaan Makanan dan minuman	15 Laporan	3 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%		15 Laporan	100%
2.11.2.11.01.01.18	Kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	24 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%		24 laporan	100%
2.11.2.11.01.01.19	Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	24 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%		24 laporan	100%
2.11.2.11.01.01.20	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa keamanan kantor	24 Laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%		24 Laporan	100%
<b>2.11.2.11.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.2.11.01.02.04	Kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	1 unit	1 unit	-	-			1 unit	100%
2.11.2.11.01.02.22	Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%		8 laporan	100%
2.11.2.11.01.02.23	Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara	35 unit	17 unit	18 unit	18 unit	100%		35 unit	100%
2.11.2.11.01.02.24	Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah unit rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	-	-	-	-		-	-
<b>2.11.2.11.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-		<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.11.2.11.01.03.02	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas peserta perlengkapannya	53 stel	53 stel	-	-	-		53 stel	100%

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.2.11.01.xx	Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah pakaian dinas hari - hari tertentu	-	-	-	-	-		-	-
<b>2.11.2.11.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	-	-	-		<b>75%</b>	<b>100%</b>
2.11.2.11.01.05.04	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta pembinaan kinerja aparatur	65 orang	65 orang	-	-	-		65 orang	100%
<b>2.11.2.11.01.08</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah</b>	<b>Persentasi layanan data dan informasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.11.2.11.01.08.01	Kegiatan Pengembangan Database terpadu dan sistem Informasi Perangkat daerah	jumlah jenis data dan informasi Perangkat Daerah yang dikelola	3 Laporan	3 jenis	3 Laporan	3 Laporan	100%		3 Laporan	100%
		jumlah jenis data dan informasi Perangkat Daerah yang dikelola	3 Jenis	-	-	-	-		3 Jenis	100%
<b>2.11.2.11.01.001.16</b>	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan</b>	<b>Persentase SDM Koperasi dan Usaha Mikro yang</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>		<b>60%</b>	<b>100%</b>

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	<b>kualitasnya meningkat (%)</b>								
2.11.2.11.01.001.16.013	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DAK)	Jumlah pengurus ,pengawas dan pembina koperasi yang terlatih serta peserta diklat usaha mikro(Orang)	323 orang	165 orang	158 orang	158 orang	100%		323 orang	100%
<b>2.11.2.11.01.22</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Non Formal</b>	<b>Jumlah Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat</b>	<b>300 orang</b>	<b>365 Orang</b>	<b>100 orang</b>	<b>147 orang</b>	<b>147%</b>		<b>300 orang</b>	<b>170%</b>
2.11.2.11.01.22.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Non Formal	Jumlah peserta bimtek pemberdayaan dan pengembangan usaha non formal	600 orang	600 orang	-	-	-		600 orang	100%
		Jumlah peserta sosialisasi dan evaluasi penataan dan pembinaan UNF	200 Orang	200 Orang	-	-	-		200 Orang	100%

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jumlah peserta kegiatan pemberdayaan bagi Usaha Non Formal (orang)	200 Orang	-	200 Orang	200 Orang	100%		200 Orang	100%
2.11.2.11.01.22.02	Kegiatan Fasilitasi pembiayaan bagi Usaha Non Formal	Jumlah peserta temu usaha antara usaha non formal dengan Lembaga Keuangan (BUMN BUMD perusahaan lainnya dan lembaga keuangan lainnya)	600 orang	600 orang	-	-	-		600 orang	100%
		PKL Award	1 kali	1 kali	-	-	-		1 kali	100%
		Pengembangan Sistem informasi PKL	1 unit	1 unit	-	-	-		1 unit	100%
		jumlah peserta kegiatan fasilitasi akses pembiayaan bagi Usaha Non Formal (orang)	200 Orang		200 Orang	200 Orang	100%		200 Orang	100%

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.2.11.01.22.03	Kegiatan Promosi dan pemasaran bagi Usaha Non Formal	Jumlah kegiatan promosi dan Pameran Usaha Non Formal	4 lokasi	4 lokasi	-	-	-		4 lokasi	100%
		Jumlah lokasi Usaha Non Formal yang dipromosikan	4 lokasi	4 lokasi	-	-	-		4 lokasi	100%
		Street vendor festival	1 kali	1 kali	-	-	-		1 kali	100%
		Jumlah Kegiatan promosi lokasi Usaha Non Formal (Kegiatan)	4 kegiatan	-	4 kegiatan	4 kegiatan	100%		4 kegiatan	100%
<b>2.11.2.11.01.23</b>	<b>Program Pengawasan Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>Jumlah Koperasi yang menaati peraturan Perkoperasian</b>	<b>245 Koperasi</b>	<b>150 Koperasi</b>	<b>95 Koperasi</b>	<b>95 Koperasi</b>	<b>100%</b>		<b>245 Koperasi</b>	<b>100%</b>
2.11.2.11.01.23.01	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Koperasi	Jumlah kegiatan sosialisasi bahaya rentenir	450 Orang	450 Orang	-	-	-		450 Orang	100%
		Jumlah peserta Bimtek peningkatan Kompetensi SDM pengawas koperasi	150 orang	150 orang	-	-	-		150 orang	100%

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jumlah laporan pelayanan pengaduan korban rentenir (laporan)	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%		1 Laporan	100%
2.11.2.11.0123.02	Kegiatan Pemantauan dan Pemeriksaan Manajemen Koperasi	Jumlah Audit Koperasi	22 Koperasi	22 Koperasi	0 Koperasi	0 Koperasi	-		22 Koperasi	100%
		Jumlah peserta Workshop penyusunan laporan Keuangan KSP/USP Koperasi	150 Orang	150 Orang	-	-	-		150 Orang	100%
2.11.2.11.01.23.03	Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Pendampingan Pengelolaan manajemen, Otonomisasi (Pemisahan neraca KSP/USP Koperasi)	110 Koperasi	110 Koperasi	-	-	-		110 Koperasi	100%
		Jumlah peserta Workshop Pendampingan Pengelolaan manajemen,	150 orang	150 orang	-	-	-		150 orang	100%

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Otonomisasi dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi								
		Jumlah peserta bimtek strategi meningkatkan scoring penilaian KSP/USP	150 orang	150 orang	-	-	-		150 orang	100%
		jumlah pendampingan pengelolaan manajemen otonomisasi dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi (Koperasi)	77 Koperasi	-	77 Koperasi	77 Koperasi	100%		77 Koperasi	100%
2.11.2.11.01.24	Program Pemberdayaan UMKM	Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat	240 UM	240 UM	-	-	-		240 UM	100%
		Jumlah usaha mikro yang meningkat usahanya (usaha mikro)	200 UM	-	200 UM	200 UM	100%		200 UM	100%

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.2.11.01.24.01	Kegiatan Penyelenggaraan promosi dan pemasaran produk UMKM	Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasiltasi pemasaran	35 UM	55 UM	-	-	-		35 UM	157.14%
		Jumlah UMKM yang diberikan fasilitas sistem bisnis	5 UM	5 UM	-	-	-		5 UM	100%
		Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasiltasi promosi	20 UM	20 UM	-	-	-		20 UM	100%
		Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi promosi pemasaran dan sistem bisnis (usaha mikro)	50 Usaha Mikro	-	50 Usaha Mikro	50 Usaha Mikro	100%		50 Usaha Mikro	100%
2.11.2.11.01.24.02	Fasilitasi Intermediasi akses Pembiayaan UMKM	Jumlah peserta temu usaha akses pembiayaan bagi usaha mikro	400 UM	400 UM	-	-	-		400 UM	100%

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jumlah peserta temu usaha fasilitasi akses pembiayaan bagi Usaha Mikro (usaha mikro)	200 Usaha Mikro	-	200 Usaha Mikro	200 Usaha Mikro	100%		200 Usaha Mikro	100%
2.11.2.11.01.24.03	Fasilitasi Pengembangan pendampingan dan kemitraan usaha pelaku usaha mikro	Jumlah peserta yang fasilitasi sertifikasi HAKI dan halal, pendampingan, workshop, bimtek, monev WUB, UMKM Award	250 UM	250 UM	-	-	-		250 UM	100%
		Fasilitasi sertifikasi Halal Haki dan Pendampingan (usaha mikro)	100 Usaha Mikro	-	100 Usaha Mikro	100 Usaha Mikro	100%		100 Usaha Mikro	100%
<b>2.11.2.11.01.27</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi</b>	<b>Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>		<b>60%</b>	<b>100%</b>

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.2.11.01.27.01	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah pengurus pengawas dan pembina Koperasi yang terlatih	280 orang	280 orang	-	-	-		280 orang	100%
		jumlah pengelola Koperasi yang terlatih (Orang)	-	-	-	-		-	-	
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian (DID Tambahan)	jumlah pengelola Koperasi yang terlatih (Orang)	80	-	80	80	100%		80	100%
<b>2.11.2.11.01.28</b>	<b>Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi</b>	<b>Jumlah Koperasi berkualitas</b>	<b>70 Koperasi</b>	<b>30 Koperasi</b>	<b>40 Koperasi</b>	<b>40 Koperasi</b>	<b>100%</b>		<b>70 Koperasi</b>	<b>100%</b>
2.11.2.11.01.28.01	Kegiatan Pengembangan Jaringan Pemasaran dan Promosi Produk Koperasi	jumlah kegiatan temu usaha/kemitraan	3 kali	3 kali	-	-	-		3 kali	100%
		Jumlah kegiatan promosi dan pameran	5 kali	5 kali	-	-	-		5 kali	100%
		Terlaksananya fasilitasi jaringan usaha Koperasi (Kegiatan)	3 Kali	-	3 Kali	3 Kali	100%		3 Kali	100%

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.2.11.01.28.02	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan, perlindungan dan Pembinaan Koperasi.	Jumlah kegiatan sosialisasi gerakan gemar berkoperasi	2266 Orang	2266 Orang	-	-	-		2266 Orang	100%
		Kegiatan pelaksanaan peringatan Harkop Tk. Kota Bandung	1 kali	1 kali	-	-	-		1 kali	100%
		Jumlah Koperasi yg mendapatkan penghargaan	15 koperasi	15 koperasi	-	-	-		15 koperasi	100%
		jumlah laporan triwulanan perkembangan koperasi (laporan)	4 laporan	-	4 laporan	4 laporan	100%		4 laporan	100%
		Jumlah koperasi yang terbina (Koperasi)	285 koperasi	-	285 koperasi	285 koperasi	100%		285 koperasi	100%
		jumlah koperasi di tempat ibadah setiap kelurahan (Koperasi)	10 koperasi	-	10 koperasi	10 koperasi	100%		10 koperasi	100%
2.11.2.11.01.28.03	Kegiatan Perluasan akses pembiayaan bagi koperasi	Jumlah kegiatan sosialisasi akses pembiayaan	452 Orang	452 Orang	-	-	-		452 Orang	100%

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah kegiatan workshop fasilitasi pembiayaan bagi koperasi	650 orang	650 orang			-		650 orang	100%
		Jumlah koperasi juara	6 Kec	6 Kec			-		6 Kec	100%
		jumlah penataan toko koperasi	10 koperasi	10 koperasi			-		10 koperasi	100%
		jumlah koperasi juara setiap kelurahan (Koperasi)	13 koperasi	-	13 koperasi	13 koperasi	100%		13 koperasi	100%
		jumlah Workshop fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi (Koperasi)	0	-	0	0	-		0	-
<b>2.11.2.11.01.xx</b>	<b>Program Pengembangan Usaha Kecil</b>	<b>Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	-	-	-		<b>60%</b>	<b>100%</b>
2.11.2.11.01.xx.xx	Capacity building bagi SDM Usaha Mikro	Jumlah peserta Diklat Usaha Mikro	360 orang	360 orang	-	-	-		360 orang	100%

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.2.11.01.xx	Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	60%	-	60%	60%	100%		60%	100%
2.11.2.11.01.xx.xx	Capacity building bagi SDM Usaha Mikro	Jumlah peserta Diklat Usaha Mikro	80 orang	-	80 orang	80 orang	100%		80 orang	100%
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1 tahun	-	-	-	-	1 tahun	1 tahun	100%

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.17.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Laporan Penyediaan Peralatan rumah Tangga	4 laporan	-	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100%
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Perundang Undangan yang tersedia								
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
<b>2.17.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan atau Listrik	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
<b>2.17.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Unit Kendaraan Dinas /operasional yang terpelihara	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2.17.01.2.09.06	2.17.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan kerja yang diperbaiki	57 unit	-	-	-	-	57 unit	57 unit	100%
2.17.01.2.09.09	2.17.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Berkala Gedung Kantor	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
<b>2.17.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Cakupan Fasilitas Ijin Usaha Simpan Pinjam Sesuai Prosedur</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.17.02.2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Fasilitasi Ijin Usaha Simpan Pinjam sesuai prosedur</b>	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Akta Pendirian Koperasi	20 koperasi	-	-	-	-	20 koperasi	20 koperasi	100%
		Jumlah Fasilitasi Digitalisasi Koperasi	15 Koperasi	-	-	-	-	15 Koperasi	15 Koperasi	100%
2.17.03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan</b>	15.6%	-	-	-	-	15%	15%	100%
		<b>Jumlah Koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian</b>	170 Koperasi		170 Koperasi	170 Koperasi	100%			

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.17.03.2.01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan</b>	<b>15.6%</b>	-	-	-	-	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>100%</b>
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Koperasi	180 koperasi	-	-	-	-	180 koperasi	180 koperasi	100%
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memenuhi kriteria Pemeriksaan Audit	15 koperasi	-	-	-	-	15 koperasi	15 koperasi	100%
<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat (%)</b>	<b>70%</b>	-	-	-	-	<b>65%</b>	<b>65%</b>	<b>100%</b>

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.17.05.2.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat (%)</b>	<b>70%</b>	-	-	-	-	<b>65%</b>	<b>65%</b>	<b>100%</b>
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus Koperasi yang Kualitasnya Meningkatkan	240 orang	-	-	-	-	240 orang	240 orang	100%
		Terlatihnya pengurus, pengawas, pengelola koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (DAK)	110 orang	-	-	-	-	110 orang	110 orang	100%
2.17.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Jumlah Koperasi berkualitas</b>	<b>40 Koperasi</b>	-	<b>40 Koperasi</b>	<b>40 Koperasi</b>	<b>100%</b>	-	-	-
		<b>Persentase Koperasi yang Meningkatkan Omzetnya</b>	<b>15.13%</b>	-	-	-	-	<b>13,47%</b>	<b>13,47%</b>	<b>100%</b>

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah kemitraan usaha koperasi	2 kemitraan	-	-	-	-	2 kemitraan	2 kemitraan	100%
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang meningkat omsetnya	15.13%	-	-	-	-	13,47%	13,47%	100%
		Jumlah Koperasi berkualitas	40 Koperasi	-	40 Koperasi	40 Koperasi	100%	-	-	-
		Jumlah Kemitraan Usaha Koperasi	2 kemitraan	-	-	-	-	2 kemitraan	2 kemitraan	100%
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Jumlah kegiatan pemasaran dan promosi produk koperasi (Kegiatan)	4 kegiatan	-	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
		Jumlah Koperasi juara setiap kelurahan	30 Koperasi	-	30 Koperasi	30 Koperasi	100%	-	-	-

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi di tempat ibadah setiap kelurahan	30 Koperasi	-	30 Koperasi	30 Koperasi	100%	-	-	-
		Jumlah Koperasi yang bertransformasi digital dalam pengembangan usaha, komunikasi dan kerja sama antar koperasi	60 Koperasi	-	60 Koperasi	60 Koperasi	100%	-	-	-
		Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi (koperasi)	12 koperasi	-	-	-	-	12 koperasi	12 koperasi	100%
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase usaha non formal yang meningkat kemampuan usahanya</b>	<b>3,93%</b>	-	-	-	-	<b>3,76%</b>	<b>3,76%</b>	<b>100%</b>
		<b>Persentase Usaha Mikro yang meningkat</b>	<b>11,14%</b>	-	-	-	-	<b>10,12%</b>	<b>10,12%</b>	<b>100%</b>

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		keberdayaan usahanya								
		Jumlah Kemitraan Usaha Mikro	8 kemitraan	-	-	-	-	4 kemitraan	4 kemitraan	100%
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pelaku usaha non formal yang meningkat kemampuan usahanya	3.93%	-	-	-	-	3.76%	3.76%	100%
		Persentase usaha mikro yang meningkat keberdayaan usahanya	11,14%	-	-	-	-	11,14%	11,14%	100%
		Jumlah Kemitraan Usaha Mikro	8 kemitraan	-	-	-	-	4 kemitraan	4 kemitraan	100%
2.17.07.2.01.05	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Data pelaku usaha non formal/ PKL binaan	150 orang	-	-	-	-	150 orang	150 orang	100%

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sosialisasi aturan penataan dan pembinaan PKL	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Kegiatan Temu Bisnis dan Fasilitasi Kemitraan dan Jaringan Usaha Mikro	4 laporan	-	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100%
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan kompetensi usaha mikro	4 laporan	-	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100%
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	bimtek bagi pelaku usaha non formal/ PKL binaan	7 kegiatan	-	-	-	-	7 kegiatan	7 kegiatan	100%
		Koordinasi dan sinkronisasi Satgasus PKL	20 kali	-	-	-	-	20 kali	20 kali	100%

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Promosi lokasi/ tempat pelaku usaha non formal/ PKL binaan	13 lokasi	-	-	-	-	13 lokasi	13 lokasi	100%
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase usaha mikro yang omsetnya meningkat</b>	<b>4.64%</b>	-	-	-	-	<b>4.39%</b>	<b>4.39%</b>	<b>100%</b>
<b>2.17.08.2.01 -</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Persentase usaha mikro yang omsetnya meningkat</b>	<b>4.64%</b>	-	-	-	-	<b>4.39%</b>	<b>4.39%</b>	<b>100%</b>
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi promosi, pemasaran dan sistem bisnis	100 UM	-	-	-	-	100 UM	100 UM	100%
		jumlah peserta Diklat usaha mikro	200 orang	-	-	-	-	200 orang	200 orang	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di tahun 2021 telah sesuai target yang ditetapkan di renstra Dinas Koperasi dan UKM tahun 2018-2023, baik itu capaian Program, kegiatan maupun sub kegiatan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung**

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan urusan Pembinaan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 18 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Adapun secara lebih detail berkenaan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

- a. **Tugas Pokok**

Melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 61 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

- b. **Fungsi**

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan lingkup Koperasi, dan Usaha Mikro;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup Koperasi dan Usaha Mikro;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Koperasi, dan Usaha Mikro;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup Koperasi, dan usaha Mikro; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara organisatoris Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung terbagi dalam organisasi yang meliputi Sekretariat, Bidang-bidang dan UPT yang melaksanakan fungsi sebagai berikut:

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengkoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang dan UPTD.

#### **2. Bidang Pengawasan Koperasi**

Bidang Pengawasan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pengawasan Koperasi meliputi program pengawasan Koperasi, evaluasi pelaporan Koperasi serta monitoring penerapan sanksi

#### **3. Bidang Pemberdayaan Koperasi**

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pemberdayaan koperasi meliputi kelembagaan dan tatalaksana Koperasi, bina usaha koperasi serta perlindungan koperasi dan peran serta masyarakat

#### **4. Bidang Usaha Non Formal**

Bidang Usaha Non Formal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Usaha Non Formal meliputi

pembinaan Usaha Non Formal serta monitoring, evaluasi dan data Usaha Non Formal

#### **5. Bidang Usaha Mikro**

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Usaha Mikro meliputi pemberdayaan Usaha Mikro, pengembangan Usaha Mikro serta kemitraan dan jaringan Usaha Mikro

#### **6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Koperasi dan UM (UPTD Balatkop dan UM )**

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Melaksanakan ketatausahaan UPT.

#### **7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub Kelompok dan/atau kelompok substansi sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional yang kompeten.
- c. Dalam melaksanakan tugas koordinasi kelompok substansi, dapat ditunjuk pejabat fungsional sebagai sub koordinator yang merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional.

- d. Sub koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada kelompok substansi sesuai dengan pengelompokan uraian tugas dan fungsi.

**c. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 61 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung terdiri dari :

**A. Kepala Dinas**

**B. Sekretaris**, membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Kelompok Substansi Program, Data dan Informasi.

**C. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi**, membawahi :

- 1) Kelompok Substansi Kelembagaan dan Tata Laksana Koperasi;
- 2) Kelompok Substansi Bina Usaha Koperasi;
- 3) Kelompok Substansi Perlindungan Koperasi dan Peran Serta Masyarakat.

**D. Bidang Penilaian, Pengawasan dan Penindakan**, membawahi :

- 1) Kelompok Substansi Program Pengawasan Koperasi;
- 2) Kelompok Substansi Evaluasi Pelaporan Koperasi;
- 3) Kelompok Substansi Monitoring Penerapan Sanksi Koperasi.

**E. Bidang Usaha Non Formal**, membawahi :

- 1) Kelompok Substansi Pembinaan Usaha Non Formal;
- 2) Kelompok Substansi Monitoring, Evaluasi, dan Data Usaha Non Formal.

**F. Bidang Usaha Mikro**, membawahi:

- 1) Kelompok Substansi Pemberdayaan Usaha Mikro;
- 2) Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro;
- 3) Kelompok Substansi Kemitraan dan Jaringan Usaha Mikro.

**G. Kepala UPT Balatkop dan UM**, membawahi :

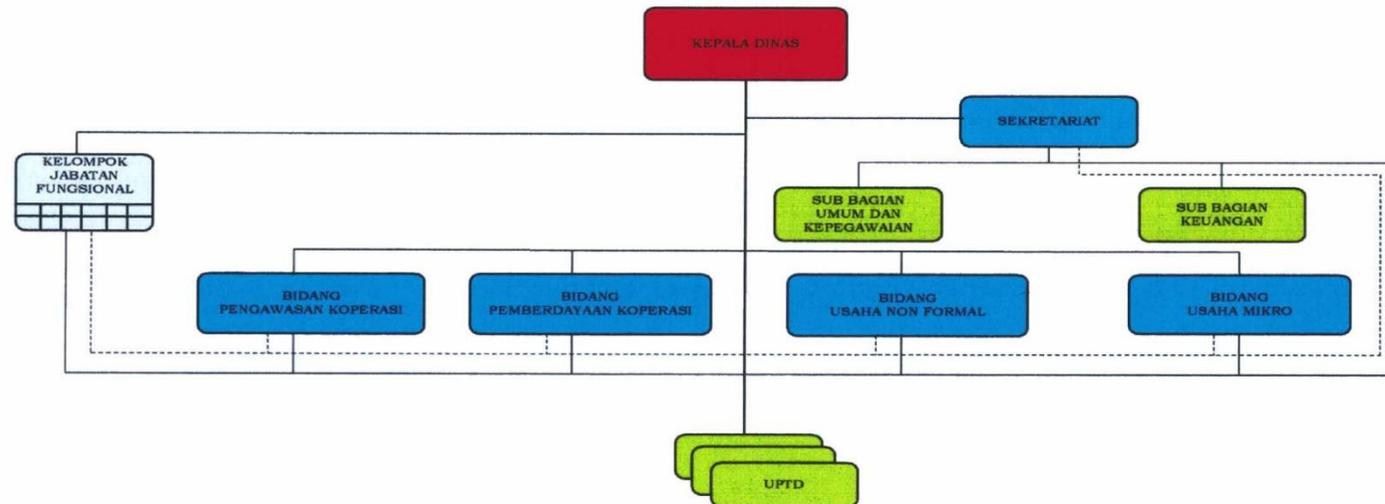
- 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung**  
**(Peraturan Wali Kota Nomor 61 tahun 2022)**

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR : 61 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 2 Juni 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
**SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19760604 200604 1 002

WALI KOTA BANDUNG,  
 TTD.  
 YANA MULYANA

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM, dapat dilihat pada table T.C.30 berikut :

**Tabel T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM Kota Bandung**

NO	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
1	Jumlah Koperasi Berkualitas	-	30 Koperasi	11 Koperasi	40 Koperasi	0	0	-	30 Koperasi	11 Koperasi	40 Koperasi	0	0	
2	Jumlah Koperasi yang mentaati Peraturan Perkoperasian	-	150 koperasi	95 Koperasi	180 Koperasi	0	0	-	150 koperasi	95 Koperasi	180 Koperasi	0	0	
3	Jumlah Koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan	-	0	0	110 Koperasi	0	0	-	0	0	110 Koperasi	0	0	
4	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	-	60%	60%	60%	65%	70%	-	60%	60%	60%	65%	70%	
5	Cakupan Fasilitasi Ijin Usaha Simpan Pinjam sesuai prosedur	-	N/A	N/A	N/A	100%	100%	-	N/A	N/A	N/A	100%	100%	
6	Persentase Koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan	-	N/A	N/A	14,3%	15%	15,60%	-	N/A	N/A	14,3%	15%	15,60%	

NO	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
7	Persentase Koperasi yang meningkat omsetnya	-	N/A	11,11%	12,29%	13,47%	15,13%	-	N/A	11,11%	12,29%	13,47%	15,13%	
8	Jumlah usaha Mikro yang usahanya meningkat	-	240 UM	200 UM	240 orang	0	0	-	240 UM	200 UM	240 orang	0	0	
9	Jumlah Usaha NonFormal yang kemampuan usahanya meningkat	-	200 orang	100 orang	0	0	0	-	365 orang	147 orang	0	0	0	
10	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	-	60%	60%	0	0	0	-	60%	60%	0	0	0	
11	Persentase Usaha Mikro yang nilai omsetnya meningkat	-	N/A	N/A	3,20%	0	0	-	N/A	N/A	3,20%	0	0	
12	Persentase Usaha NonFormal yang kemampuan usahanya meningkat	-	N/A	3,42%	3,59%	3,76%	3,93%	-	N/A	3,42%	3,59%	3,76%	3,93%	
14	Persentase Usaha Mikro yang meningkat keberdayaan usahanya	-	N/A	4,05%	5,06%	10,12%	11,14%	-	N/A	4,05%	5,06%	10,12%	11,14%	

NO	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
15	Jumlah kemitraan Usaha Mikro	-	N/A	N/A	N/A	4 kemitraan	8 kemitraan	-	N/A	N/A	N/A	4 kemitraan	8 kemitraan	
16	Persentase Usaha Mikro omsetnya meningkat	-	N/A	N/A	N/A	4,39%	4,64%	-	N/A	N/A	N/A	4,39%	4,64%	
17	IKM	85	82	82,25	82,5	82,75	83	85,09	82.08	87.25	87,615	82,75	83	
18	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	-	-	-	-	83,5	85	-	-	-	-	83,5	85	

## 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM Kota Bandung

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain diangkat dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini serta kemungkinan kondisi dimasa datang. Penentuan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung yang berkaitan dengan pelayanan, teridentifikasi permasalahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Data Koperasi kurang akurat. Sampai dengan 2017 tercatat ada 2.212 koperasi aktif yang disebabkan belum dilakukan rekonsiliasi data dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di mana sebelum terbitnya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keanggotaan Koperasi tidak dibatasi oleh kewilayahan sehingga Koperasi yang anggotanya berada di luar wilayah domisili koperasi masih tercatat sebagai koperasi Kota Bandung. Tahun 2019 dengan adanya program reformasi total Koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yang lebih mengedepankan kualitas, setelah dilakukan pendataan ulang koperasi hanya terdata sebanyak 735 koperasi yang aktif, dan hal ini telah di input ke dalam *Online Database System (ODS)* Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- 2) Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi yang masih rendah. Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikat dari lembaga sertifikasi profesi sampai dengan tahun 2020 sebanyak 10,89% dari jumlah pengelola koperasi.
- 3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kota Bandung untuk menjadi anggota koperasi. Jumlah penduduk yang telah berkoperasi sampai dengan tahun 2020 sebanyak 8,28%
- 4) Rendahnya akses pemasaran Pelaku usaha Mikro. Jumlah Usaha Mikro

yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran sampai dengan tahun 2020 sebanyak 7,27% dari jumlah pelaku usaha mikro

- 5) Rendahnya akses permodalan pelaku usaha mikro
- 6) Lemahnya daya saing produk pelaku usaha mikro. Jumlah pelaku usaha mikro yang berdaya saing sampai dengan tahun 2020 sebanyak 6,46% dari jumlah usaha mikro
- 7) Rendahnya konektivitas terhadap ekosistem digital. Jumlah pelaku usaha mikro yang sudah terkoneksi dengan ekosistem digital sampai dengan tahun 2020 sebanyak 3,53% dari jumlah usaha mikro
- 8) Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha mikro. Jumlah SDM pelaku usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 8,94% dari jumlah Usaha Mikro

Adapun identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut diatas sangat dipengaruhi serta memiliki korelasi dengan lingkungan eksternal sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Identifikasi Isu - isu Strategis**  
**( Lingkungan Eksternal )**

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional / Lokal	Lain - lain
1	2	3	4	5
	<p>Komitmen bersama tentang pengembangan koperasi tingkat dunia yang di canangkan oleh ICA ( International Cooperative Alliance ) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kemandirian</li> <li>✓ Kemitraan</li> <li>✓ Keanggotaan</li> <li>✓ Permodalan</li> </ul> <p>Pemulihan UMKM pasca pandemi melalui : inovasi, akses pasar, pemasaran dan penjualan (hasil studi Svara Institute : Policy Respond to stimulate MSME's Demand in the Wake of covid-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemulihan ekonomi pasca pandemic melalui BPUM (Bantuan Produktif usaha Mikro)</li> <li>▪ Alokasi Khusus Bagi UKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah</li> <li>▪ Digitalisasi UKM</li> <li>▪ Alokasi 30% ruang public Bagi UKM</li> <li>▪ Dukungan Promosi dan Akses Pasar melalui SMESCO Indonesia.</li> <li>▪ Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Instruksi Presiden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Digitalisasi Koperasi dan UMKM</li> <li>▪ Mendorong UMKM untuk berkoperasi</li> <li>▪ Kemitraan antara Usaha Besar, Usaha Kecil dan Usaha Mikro</li> <li>▪ Mendorong Koperasi ke sektor riil</li> </ul>	

	pandemic in APEC economies)	Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.</li> <li>▪ Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen)</li> </ul>		
--	-----------------------------	--	--	--

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, menetapkan prioritas pembangunan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Keterkaitan Program Prioritas**  
**Dinas Koperasi UKM Kota Bandung Tahun 2023**  
**Dengan Sasaran Pembangunan Tahun 2023**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatnya Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas Koperasi dan UKM	Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatnya Kualitas Koperasi	1. Meningkatkan Fasilitas Perijinan Usaha Simpan Pinjam 2. Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Koperasi 3. Meningkatkan Kepatuhan Koperasi 4. Meningkatkan SDM Koperasi	1. Fasilitas Perijinan Usaha Simpan Pinjam 2. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 3. Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi 4. Peningkatan SDM Koperasi	1. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 2. Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam 3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro</li> <li>2. Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan Usaha Mikro</li> <li>2. Pengembangan Usaha Mikro</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan UMKM</li> <li>2. Program Pemberdayaan UMKM</li> </ol>
--	-----------------------------------	--	--	--

Berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2023, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung merencanakan program yang mendukung prioritas tersebut.

Adapun *Review* atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

**Tabel T-C.31 (tabel 2.5)**  
**Review Rancangan Awal RKPD Kota Bandung**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah								
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandung	100 %	18.869.572.782	Kota Bandung	100 %	18.869.572.782	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bandung	100%	15.030.012.925	Kota Bandung	100%	15.030.012.925	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung	61 Orang/ bulan	15.030.012.925	Kota Bandung	61 Orang/ bulan	15.030.012.925	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan dan peningkatan wawasan pegawai	Kota Bandung	1 laporan	221.052.290	Kota Bandung	1 laporan	221.052.290	
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bandung	61 Paket	80.225.250	Kota Bandung	61 Paket	80.225.250	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bandung	61 Orang	140.827.040	Kota Bandung	61 Orang	140.827.040	
<b>2.17.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100 %</b>	<b>1.288.047.695</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100 %</b>	<b>1.288.047.695</b>	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bandung	4 Paket	26.040.000	Kota Bandung	4 Paket	26.040.000	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bandung	4 Paket	402.619.290	Kota Bandung	4 Paket	402.619.290	
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bandung	4 Paket	80.267.430	Kota Bandung	4 Paket	80.267.430	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bandung	4 Paket	159.285.000	Kota Bandung	4 Paket	159.285.000	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bandung	4 Paket	77.517.000	Kota Bandung	4 Paket	77.517.000	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bandung	9 Dokumen	20.388.000	Kota Bandung	9 Dokumen	20.388.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung	12 Laporan	521.930.975	Kota Bandung	12 Laporan	521.930.975	
<b>2.17.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100 %</b>	<b>149.761.200</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100 %</b>	<b>149.761.200</b>	
2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Bandung	4 Unit	149.761.200	Kota Bandung	4 Unit	149.761.200	
<b>2.17.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100 %</b>	<b>1.327.801.072</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100 %</b>	<b>1.327.801.072</b>	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bandung	12 Laporan	501.889.672	Kota Bandung	12 Laporan	501.889.672	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bandung	12 Laporan	825.911.400	Kota Bandung	12 Laporan	825.911.400	
<b>2.17.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100 %</b>	<b>852.897.600</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100 %</b>	<b>852.897.600</b>	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bandung	24 Unit	555.901.000	Kota Bandung	24 Unit	555.901.000	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bandung	57 Unit	43.190.100	Kota Bandung	57 Unit	43.190.100	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bandung	1 Unit	253.806.500	Kota Bandung	1 Unit	253.806.500	
<b>2.17.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Cakupan fasilitasi ijin usaha simpan pinjam sesuai prosedur</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100 %</b>	<b>451.120.000</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100 %</b>	<b>451.120.000</b>	
<b>2.17.02.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten atau Kota</b>	<b>Cakupan fasilitasi ijin usaha simpan pinjam sesuai prosedur</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100 %</b>	<b>451.120.000</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100 %</b>	<b>451.120.000</b>	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bandung	20 Unit Usaha	451.120.000	Kota Bandung	20 Unit Usaha	451.120.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>15.60 %</b>	<b>1.723.129.661</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>15.60 %</b>	<b>1.723.129.661</b>	
2.17.03.2.01	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>15.60 %</b>	<b>1.723.129.661</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>15.60 %</b>	<b>1.723.129.661</b>	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bandung	115 Koperasi	1.442.251.661	Kota Bandung	115 Koperasi	1.442.251.661	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Kota Bandung	15 Koperasi	280.878.000	Kota Bandung	15 Koperasi	280.878.000	
2.17.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>70 %</b>	<b>1.372.305.513</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>70 %</b>	<b>1.378.275.513</b>	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.05.2.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>70 %</b>	<b>945.022.188</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>70 %</b>	<b>950.992.188</b>	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Bandung	230 Orang	945.022.188	Kota Bandung	230 Orang	950.992.188	
2.17.05.2.02	<b>Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>70%</b>	<b>427.283.325</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>70%</b>	<b>427.283.325</b>	
2.17.05.2.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Terlatihnya pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kota Bandung	200 orang	427.283.325	Kota Bandung	200 orang	427.283.325	
2.17.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>1. Persentase koperasi yang meningkat omsetnya 2. Jumlah Kemitraan Usaha Koperasi</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>1. 15.13 % 2. 2 Kemitraan</b>	<b>1.192.689.850</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>1. 15.13 % 2. 2 Kemitraan</b>	<b>1.192.689.850</b>	
2.17.06.2.01	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1. Persentase koperasi yang meningkat omsetnya 2. Jumlah Kemitraan Usaha Koperasi</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>1. 15.13 % 2. 2 Kemitraan</b>	<b>1.192.689.850</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>1. 15.13 % 2. 2 Kemitraan</b>	<b>1.192.689.850</b>	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bandung	64 Unit Usaha	1.192.689.850	Kota Bandung	64 Unit Usaha	1.192.689.850	
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>1. Persentase usaha non formal yang meningkat kemampuan usahanya 2. Persentase usaha mikro yang meningkat keberdayaan usahanya 3. Jumlah kemitraan usaha mikro</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>1. 3.93 % 2. 11.14 % 3. 8 Kemitraan</b>	<b>4.713.400.700</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>1. 3.93 % 2. 11.14 % 3. 8 Kemitraan</b>	<b>5.339.989.700</b>	
<b>2.17.07.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>1. Persentase usaha non formal yang meningkat kemampuan usahanya 2. Persentase usaha mikro yang meningkat keberdayaan usahanya 3. Jumlah kemitraan usaha mikro</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>1. 3.93 % 2. 11.14 % 3. 8 Kemitraan</b>	<b>4.713.400.700</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>1. 3.93 % 2. 11.14 % 3. 8 Kemitraan</b>	<b>5.339.989.700</b>	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Bandung	4 dokumen	583.495.750	Kota Bandung	4 dokumen	583.495.750	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kota Bandung	40 Unit Usaha	812.885.550	Kota Bandung	40 Unit Usaha	812.885.550	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kota Bandung	800 Unit Usaha	1.779.746.400	Kota Bandung	800 Unit Usaha	2.029.746.400	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah peserta Bimbingan Teknis manajemen Usaha (UP2K) - Musrenbang	Kota Bandung	953 Orang	1.537.273.000	Kota Bandung	953 Orang	1.913.862.000	
		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Bandung	839 Orang		Kota Bandung	839 Orang		
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Usaha Mikro yang omzetnya meningkat</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>4.64 %</b>	<b>1.873.245.970</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>4.64 %</b>	<b>2.246.656.970</b>	
<b>2.17.08.2.01</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Persentase Usaha Mikro yang omzetnya meningkat</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>4.64 %</b>	<b>1.873.245.970</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>4.64 %</b>	<b>2.246.656.970</b>	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Bandung	300 Unit Usaha	1.873.245.970	Kota Bandung	300 Unit Usaha	2.246.656.970	
					<b>30.195.464.476</b>			<b>31.201.434.476</b>	

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

Dari Tabel 2.5. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2023 sebesar Rp. 750.000.000,- untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yaitu pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro sebesar Rp. 376.589.000,-. Dan pada program Pengembangan UMKM Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, Sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi sebesar Rp. 374.411.000,-

Dan terdapat penambahan pagu untuk pendampingan untuk pelaku usaha dari target pendampingan untuk pelaku usaha di 22 kecamatan bertambah menjadi pendampingan untuk pelaku usaha di 30 kecamatan pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan di sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan penambahan pagu sebesar Rp. 250.000.000,-

Anggaran awal RKPD Rp. 30.195.464.476,- setelah di lakukan analisis kebutuhan maka jumlah anggaran rancangan Renja menjadi Rp. 31.201.434.476,- termasuk di dalamnya untuk DAK non Fisik dan kegiatan usulan masyarakat / musrenbang.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kota Bandung.

**Table 2.6**  
**Usulan program dan kegiatan dari Masyarakat tahun 2023**

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Pengusul</b>	<b>Pagu (Rp)</b>
Bimbingan Teknis Management Usaha (UP2K)	Program Pemberdayaan usaha Menengah, usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah peserta Bimbingan Teknis manajemen Usaha (UP2K)	Kec. Batununggal (2 kelurahan, 300 orang)	105.000.000
			Kec. Babakan Ciparay (3 Kelurahan, 134 orang)	46.900.000
			Kec. Astana Anyar (4 Kelurahan, 300 orang)	105.000.000
			Kec. Regol (1 Kelurahan, 25 orang)	8.750.000
			Kec. Buahbatu (1 Kelurahan, 50 orang)	17.500.000
			Kec. Cibeunying Kidul (4 Kelurahan, 80 orang)	28.000.000
			Kec. Sukajadi (1 Kelurahan, 64 orang)	22.400.000
Jumlah Total Usulan			7 Kec. 16 Kelurahan, 953 orang	333.550.000

Adapun definisi operasional Bimbingan Teknis Management Usaha (UP2K) yaitu memberikan Bimbingan Teknis terkait management usaha kepada Pelaku Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di PKK RW, Kelurahan dan Kecamatan, terkait :

1. Keuangan sederhana,
2. Finansial Teknologi,
3. Penjualan Online,
4. Legalitas Usaha,
5. Pelayanan Prima

Jumlah Total Usulan Musrenbang pada kegiatan Bimbingan Teknis UP2K tahun 2023 adalah 7 Kecamatan, 16 kelurahan dan 953 orang, dengan total pagu untuk musrenbang tahun 2023 sebesar Rp. 333.550.000,-

# **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN UKM**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Renja-Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-Perangkat Daerah dan mengacu kepada

RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Bandung, yang merupakan rumusan Perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Bandung melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta target Kinerja Perubahan RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan Misi yang berkaitan dengan urusan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah Misi ke-2 yaitu **membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani** serta ke-3 yaitu **membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan**.

### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

Tujuan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi/perusahaan. Tujuan usaha berupa target yang bersifat kuantitatif dan merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Dalam

merumuskan tujuan harus bersikap SMART, yaitu specific, measurable, action-oriented, realistic, dan timely, atau spesifik/khusus, bisa diukur, memiliki orientasi pada tindakan, realistis, serta ada jelas penentuan waktu.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, indikator sasaran dan target kinerja pada Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran**  
**Dinas Koperasi UKM Kota Bandung**

<b>VISI</b>	Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis					
<b>MISI</b>	1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih 2) Membangun perekonomian yang mandiri kokoh dan berkeadilan					
<b>TUJUAN RPJMD</b>	<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>TUJUAN DINAS KUKM</b>	<b>SASARAN DINAS KUKM</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET TAHUN 2023</b>
Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Dinas Koperasi dan UKM	Nilai	85
Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	10,64
			Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Omset dan atau Kemampuan Usahanya Meningkatkan	Persen	4,29

Kebijakan dan strategi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung.

# **BAB IV**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN UKM**

### **4.1 Rekapitulasi Program Dan Kegiatan Dinas Koperasi Ukm Tahun 2023**

Pada Tahun 2023, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung akan menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan wajib sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
  - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten atau Kota
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
  - Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

### 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

- Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM

### 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

### 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

- Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
- Sub Kegiatan Kegiatan Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

## 6. Program Pengembangan UMKM

- Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
- Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi

Program dan kegiatan non urusan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung sebagai berikut :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
  - ***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***
    - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - ***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***
    - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  - ***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***
    - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan
    - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - ***Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***
    - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- ***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **4.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi Ukm Tahun 2023**

Tabel di bawah ini merupakan Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi UKM tahun 2023 serta prakiraan maju tahun 2024.

**Tabel 4.1**  
**Program dan Kegiatan Dinas Koperasi UKM tahun 2023**  
**dan prakiraan maju tahun 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.01	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah								
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandung	100 %	18.869.572.782	APBD		100 %	19.813.051.421
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bandung	100%	15.030.012.925	APBD		100%	15.781.513.571
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung	61 Orang/ bulan	15.030.012.925	APBD		61 Orang/ bulan	15.781.513.571
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan dan peningkatan wawasan pegawai	Kota Bandung	1 laporan	221.052.290	APBD		1 laporan	232.104.905
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bandung	61 Paket	80.225.250	APBD		61 Paket	84.236.513
2.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bandung	61 Orang	140.827.040	APBD		61 Orang	147.868.392
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandung	100 %	1.288.047.695	APBD		100 %	1.352.450.080
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kota Bandung	4 Paket	26.040.000	APBD		4 Paket	27.342.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bangunan Kantor yang Disediakan							
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bandung	4 Paket	402.619.290	APBD		4 Paket	422.750.255
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bandung	4 Paket	80.267.430	APBD		4 Paket	84.280.802
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bandung	4 Paket	159.285.000	APBD		4 Paket	167.249.250
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bandung	4 Paket	77.517.000	APBD		4 Paket	81.392.850
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bandung	9 Dokumen	20.388.000	APBD		9 Dokumen	21.407.400
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung	12 Laporan	521.930.975	APBD		12 Laporan	548.027.524
<b>2.17.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100 %</b>	<b>149.761.200</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>157.249.260</b>
2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Bandung	4 Unit	149.761.200	APBD		4 Unit	157.249.260
<b>2.17.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100 %</b>	<b>1.327.801.072</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>1.394.191.126</b>

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bandung	12 Laporan	501.889.672	APBD		12 Laporan	526.984.156
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bandung	12 Laporan	825.911.400	APBD		12 Laporan	867.206.970
<b>2.17.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100 %</b>	<b>852.897.600</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>895.542.480</b>
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bandung	24 Unit	555.901.000	APBD		24 Unit	583.696.050
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bandung	57 Unit	43.190.100	APBD		57 Unit	45.349.605
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bandung	1 Unit	253.806.500	APBD		1 Unit	266.496.825
<b>2.17.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Cakupan fasilitasi ijin usaha simpan pinjam sesuai prosedur</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100 %</b>	<b>451.120.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>473.676.000</b>
<b>2.17.02.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten atau Kota</b>	<b>Cakupan fasilitasi ijin usaha simpan pinjam sesuai prosedur</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>100 %</b>	<b>451.120.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>473.676.000</b>
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang	Kota Bandung	20 Unit Usaha	451.120.000	APBD		20 Unit Usaha	473.676.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>15.60 %</b>	<b>1.723.129.661</b>	<b>APBD</b>		<b>15.60 %</b>	<b>1.809.286.144</b>
<b>2.17.03.2.01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>15.60 %</b>	<b>1.723.129.661</b>	<b>APBD</b>		<b>15.60 %</b>	<b>1.809.286.144</b>
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bandung	115 Koperasi	1.442.251.661	<b>APBD</b>		115 Koperasi	1.514.364.244
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Kota Bandung	15 Koperasi	280.878.000	<b>APBD</b>		15 Koperasi	294.921.900
<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>70 %</b>	<b>1.372.305.513</b>	<b>APBD</b>		<b>70 %</b>	<b>1.440.920.789</b>

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.05.2.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>70 %</b>	<b>945.022.188</b>	<b>APBD</b>		<b>70 %</b>	<b>992.273.297</b>
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Bandung	230 Orang	945.022.188	APBD		230 Orang	992.273.297
2.17.05.2.02	<b>Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>70%</b>	<b>427.283.325</b>			<b>70%</b>	<b>448.547.491</b>
2.17.05.2.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Terlatihnya pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kota Bandung	200 orang	427.283.325			200 orang	448.647.491
2.17.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>1. Persentase koperasi yang meningkat omsetnya 2. Jumlah Kemitraan Usaha Koperasi</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>1. 15.13 % 2. 2 Kemitraan</b>	<b>1.192.689.850</b>	<b>APBD</b>		<b>1. 15.13 % 2. 2 Kemitraan</b>	<b>1.252.324.343</b>
2.17.06.2.01	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1. Persentase koperasi yang meningkat omsetnya 2. Jumlah Kemitraan Usaha Koperasi</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>1. 15.13 % 2. 2 Kemitraan</b>	<b>1.192.689.850</b>	<b>APBD</b>		<b>1. 15.13 % 2. 2 Kemitraan</b>	<b>1.252.324.343</b>
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Kota Bandung	64 Unit Usaha	1.192.689.850	APBD		64 Unit Usaha	1.252.324.343

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>1. Persentase usaha non formal yang meningkat kemampuan usahanya 2. Persentase usaha mikro yang meningkat keberdayaan usahanya 3. Jumlah kemitraan usaha mikro</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>1. 3.93 % 2. 11.14 % 3. 8 Kemitraan</b>	<b>4.713.400.700</b>	<b>APBD</b>		<b>1. 3.93 % 2. 11.14 % 3. 8 Kemitraan</b>	<b>4.949.070.735</b>
<b>2.17.07.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>1. Persentase usaha non formal yang meningkat kemampuan usahanya 2. Persentase usaha mikro yang meningkat keberdayaan usahanya 3. Jumlah kemitraan usaha mikro</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>1. 3.93 % 2. 11.14 % 3. 8 Kemitraan</b>	<b>4.713.400.700</b>	<b>APBD</b>		<b>1. 3.93 % 2. 11.14 % 3. 8 Kemitraan</b>	<b>4.949.070.735</b>
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Bandung	4 dokumen	583.495.750	<b>APBD</b>		4 dokumen	612.670.538
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kota Bandung	40 Unit Usaha	812.885.550	<b>APBD</b>		40 Unit Usaha	853.529.828
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kota Bandung	800 Unit Usaha	1.779.746.400	<b>APBD</b>		800 Unit Usaha	1.868.733.720
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis manajemen Usaha (UP2K) - Musrenbang	Kota Bandung	953 Orang	1.537.273.000	<b>APBD</b>		953 Orang	1.614.136.650

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Bandung	839 Orang		APBD		839 Orang	
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Usaha Mikro yang omzetnya meningkat</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>4.64 %</b>	<b>1.873.245.970</b>	<b>APBD</b>		<b>4.64 %</b>	<b>1.966.908.269</b>
<b>2.17.08.2.01</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Persentase Usaha Mikro yang omzetnya meningkat</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>4.64 %</b>	<b>1.873.245.970</b>	<b>APBD</b>		<b>4.64 %</b>	<b>1.966.908.269</b>
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Bandung	300 Unit Usaha	1.873.245.970	APBD		300 Unit Usaha	1.966.908.269
					<b>30.195.464.476</b>				<b>31.705.237.700</b>

# BAB V

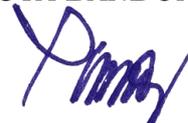
## PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 merupakan panduan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung untuk tahun anggaran 2023 dan menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja instansi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan kinerja seluruh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan, dan ketatalaksanaan serta komitmen Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Kota Bandung merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini.

Rencana kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2023, selain menjadi acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang oleh para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Bandung, 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
KOTA BANDUNG



Drs. ATET DEDI HANDIMAN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640225 199303 1 004